

RESPECTFUL WORKPLACE POLICY

Kebijakan Untuk Lingkungan Kerja yang Bebas Diskriminasi, Kekerasan, dan Pelecehan

Pertamina Group berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang bebas diskriminasi, kekerasan, dan pelecehan, dalam rangka menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan produktif bagi Perwira Pertamina untuk mendorong keberlanjutan perusahaan.

Untuk memenuhi hal tersebut, Direksi dan seluruh Perwira Pertamina berkomitmen untuk,

A. Bebas Diskriminasi

Tidak melakukan pembedaan perlakuan, pengecualian, atau preferensi yang dibuat berdasarkan etnis, ras, kebangsaan, warna kulit, agama, jenis kelamin, usia, disabilitas, atau karakteristik lainnya yang menyebabkan seseorang atau kelompok orang terdiskriminasi dalam aktivitas Perusahaan yang meliputi namun tidak terbatas pada rekrutmen dan seleksi, penilaian kinerja, pelatihan dan pengembangan, pengupahan dan pemberian manfaat, promosi/demosi, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) serta dalam interaksi sosial di lingkungan kerja. (Ref: ILO Convention No. 111 tentang Discrimination in Employment & Occupation)

B. Bebas Kekerasan & Pelecehan

Tidak melakukan serangkaian perilaku dan praktik yang tidak dapat diterima, atau ancaman, yang dapat terjadi sekali atau berkali-kali, dengan tujuan, atau mengakibatkan atau kemungkinan akan mengakibatkan kerugian fisik, psikologis, seksual atau ekonomi, termasuk di dalamnya kekerasan dan pelecehan berdasarkan gender yang tidak dikehendaki dalam bentuk fisik, verbal, non-verbal, visual, maupun emosional yang membuat seseorang merasa terintimidasi, terhina, tersinggung, direndahkan, atau dipermalukan. (Ref: ILO Convention No. 190 tentang Violence & Harassment in The World of Work)

Seluruh Perwira Pertamina berkewajiban melaporkan tindakan diskriminasi, kekerasan, dan pelecehan yang terjadi di lingkungan Pertamina Group melalui jalur-jalur pelaporan yang telah disediakan. Segala tindakan diskriminasi, kekerasan, dan pelecehan akan ditindaklanjuti dan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan Perusahaan yang berlaku dengan sanksi maksimum berupa PHK.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) bertanggung jawab menjamin implementasi Kebijakan ini dan melakukan upaya perbaikan secara berkelanjutan.

Seluruh Perwira Pertamina wajib menaati dan melaksanakan Kebijakan ini.

Jakarta, Agustus 2021

Direktur Utama,


Nicke Widyawati